

BAB VI KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

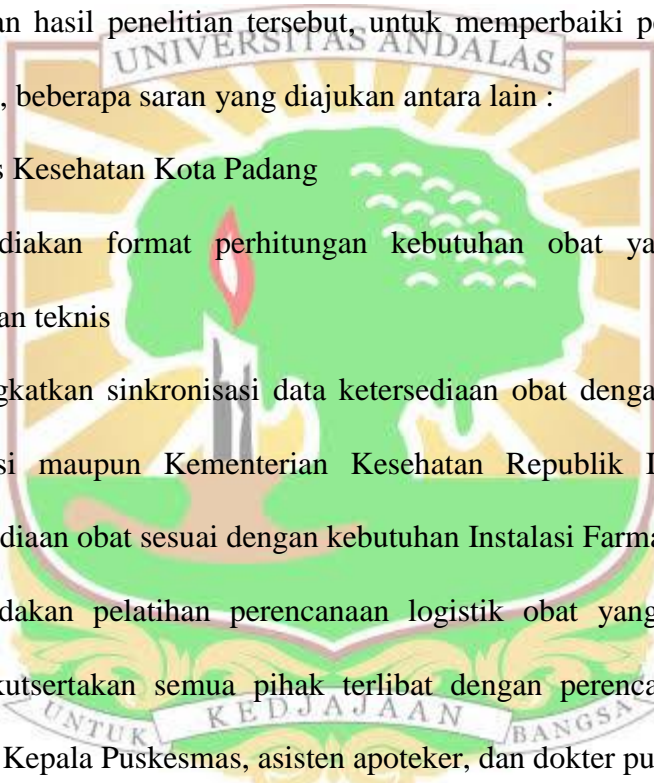
Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pemilihan obat di Puskesmas Bungus dilakukan dengan mempertimbangkan rata-rata pemakaian sebelumnya serta daftar obat yang ada pada Fornas. Data yang digunakan puskesmas sebagai pedoman perencanaan logistik obat belum lengkap diantaranya puskesmas belum menggunakan data kependudukan seperti data populasi atau rata-rata pertumbuhan penduduk. Data yang digunakan Puskesmas Bungus adalah data LPLPO (Laporan Pemakaian dan Lembaran Permintaan Obat), pemakaian sebelumnya, sisa stok, dan jumlah kunjungan.
- b. Puskesmas belum melakukan tahap kompilasi pemakaian obat dalam perencanaan logistik obat di puskesmas.
- c. Perhitungan kebutuhan obat di puskesmas menggunakan metode konsumsi dan mempertimbangkan pemakaian obat dan kebutuhan puskesmas.
- d. Puskesmas dalam proyeksi kebutuhan obat dilakukan dengan cara sederhana yaitu penyesuaian anggaran dengan kebutuhan obat. Cara ini belum sesuai dengan pedoman Depkes.
- e. Penyesuaian rencana pengadaan obat di puskesmas menggunakan metode analiasa ABC dan disesuaikan dengan ketersediaan obat di Instalasi Farmasi Kota. Evaluasi perencanaan logistik obat dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang khususnya oleh Instalasi Farmasi Kota Padang dalam satu kali tiga bulan.

- f. Evaluasi internal puskesmas dilakukan saat dibutuhkan dan tidak terjadwal. Faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi perencanaan logistik obat di Puskesmas Bungus adalah kurangnya pengetahuan tenaga perencana dalam melakukan perencanaan logistik obat. Puskesmas memenuhi kebutuhan obat dengan membeli secara mandiri menggunakan dana BLUD puskesmas.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, untuk memperbaiki perencanaan logistik obat di puskesmas, beberapa saran yang diajukan antara lain :

- 
- a. Bagi Dinas Kesehatan Kota Padang
 1. Menyediakan format perhitungan kebutuhan obat yang sesuai dengan pedoman teknis
 2. Meningkatkan sinkronisasi data ketersediaan obat dengan Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sehingga ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan Instalasi Farmasi Kesehatan Kota
 3. Mengadakan pelatihan perencanaan logistik obat yang optimal dengan mengikutsertakan semua pihak terlibat dengan perencanaan logistik obat seperti Kepala Puskesmas, asisten apoteker, dan dokter puskesmas
 - b. Bagi Puskesmas Bungus
 1. Melengkapi ketersediaan data dasar yang dibutuhkan puskesmas untuk perencanaan logistik obat sesuai dengan pedoman Depkes RI
 2. Melakukan perencanaan logistik obat sesuai dengan tahapan yang ada pada pedoman teknis pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan dan petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian puskesmas oleh Depkes RI

3. Melibatkan secara penuh pihak-pihak yang seharusnya terlibat dalam perencanaan logistik obat di puskesmas dengan membentuk tim perencanaan logistik obat terpadu

